

DUALISME KEPEMIMPINAN DAN DISFUNGSI STRUKTUR SEBAGAI HAMBATAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM

Hardani¹, Masdar Hilmy², Desi Erawati³

^{1,3} Universitas Islam Negeri Palangka Raya, ² Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

¹ hardani2510310039@uin-palangkaraya.ac.id, ² masdar.hilmy@uinsa.ac.id,

³ desi.erawati@uin-palangkaraya.ac.id

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Published : 30 Juni 2026

Keywords

Kepemimpinan Transformasional, Fungsionalisme Struktural, Pendidikan Islam

Transformational Leadership, Structural Functionalism, Islamic Education.



© Author(s) 2026
This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Institusi pendidikan Islam saat ini menghadapi tantangan besar untuk menyeimbangkan antara tuntutan inovasi era Society 5.0 dengan pemeliharaan identitas nilai-nilai keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan kepala sekolah dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas dan perubahan sistem pendidikan melalui sintesis teori kepemimpinan transformasional dan teori strukturalisme-fungsionalisme. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi dari berbagai literatur primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan analisis kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional bertindak sebagai motor penggerak fungsi adaptasi dan pencapaian tujuan dalam skema AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) milik Talcott Parsons. Kepala sekolah menggunakan stimulasi intelektual dan motivasi inspirasional untuk mendorong digitalisasi serta pembaruan kurikulum. Secara simultan, kepala sekolah menjalankan fungsi integrasi dan latensi untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tetap selaras dengan nilai-nilai Islami sebagai fondasi stabilitas organisasi.

Islamic educational institutions are currently facing significant challenges in balancing the demands for innovation in the Society 5.0 era with the preservation of religious values and identity. This study aims to analyze the role of school leadership in maintaining the balance between stability and change within the educational system through a synthesis of transformational leadership theory and structural functionalism theory. The research employed a qualitative method using a library research approach. Secondary data were collected through documentation studies from various primary and secondary literature sources, which were then analyzed using content analysis and critical analysis techniques. The findings reveal that transformational leadership functions as the driving force for adaptation and goal attainment within Talcott Parsons' AGIL scheme (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency). School principals apply intellectual stimulation and inspirational motivation to encourage digitalization and curriculum reform. Simultaneously, principals perform the functions of integration and latency to ensure that these transformations remain aligned with Islamic values as the foundation of organizational stability.

PENDAHULUAN

Institusi pendidikan Islam merupakan sebuah sistem sosial yang kompleks dan multidimensional, di mana terjadi interaksi dinamis antara berbagai elemen seperti pemimpin pendidikan, tenaga pendidik, peserta didik, serta lingkungan sosial yang melingkupinya. Setiap elemen tersebut tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai agen sosial yang membawa nilai, norma, dan orientasi tertentu yang harus diselaraskan dalam satu tujuan kolektif, yaitu mewujudkan pendidikan yang unggul secara akademik sekaligus berlandaskan nilai-nilai keislaman.¹ Dengan demikian, pendidikan Islam tidak dapat dipahami semata sebagai proses transfer ilmu, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter, internalisasi nilai, dan pembangunan peradaban.

Dalam perspektif Teori Strukturalisme-Fungsionalisme yang dikembangkan oleh tokoh seperti Emile Durkheim dan Talcott Parsons, sebuah organisasi dianggap sebagai entitas yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung (*interdependence*). Agar sistem ini tetap stabil, setiap bagian harus menjalankan fungsinya secara optimal demi menjaga keseimbangan (*equilibrium*) organisasi secara keseluruhan². Namun, tantangan dunia pendidikan di era Society 5.0 menuntut sekolah untuk tidak sekadar menjalankan fungsi rutin (mekanis), tetapi juga melakukan transformasi yang adaptif. Di sinilah peran kepemimpinan transformasional menjadi krusial³. Pemimpin transformasional bertindak sebagai motor penggerak yang mampu menginspirasi seluruh elemen sekolah untuk melampaui kepentingan sektoral demi visi kolektif⁴. Dalam kerangka Parsons, pemimpin ini adalah agen yang memastikan berjalannya skema AGIL, yaitu Adaptation (Adaptasi): Kemampuan sekolah merespons dinamika zaman, Goal Attainment (Pencapaian Tujuan): Fokus pada visi integrasi ilmu umum dan agama, Integration (Integrasi): Menjaga harmoni antar struktur agar tidak terjadi disintegrasi, Latency (Pemeliharaan Pola): Memastikan nilai-nilai Islami tetap menjadi "perekat" sosial yang langgeng⁵.

¹ Yusra Dewi Siregar, Hasan Bakti Nasution, dan Junaidi Arsyad, "Unveiling the Impact of Naqshbandiyya Tariqa Values on Islamic Education: A Comprehensive Analysis of Pesantren Dar Al Ma'arif Kota Pinang," *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 15, no. 3 (4 Agustus 2023): 2746–55, doi:10.35445/alishlah.v15i3.4312.

² Syamsu Andi Kamaruddin, "Fungsionalisme Struktural: Fondasi, Perkembangan, dan Relevansi Dalam Analisis Sosial Kontemporer Serta Implikasinya Dalam Pendidikan," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 10, no. 4b (5 Desember 2025): 62–70, doi:10.29303/jipp.v10i4b.4296.

³ Ernani Yunita, Jeessy Isjtidla, dan Irnie Victorynie, "PERAN KEPEMIMPINAN VISIONER KEPALA SEKOLAH DALAM MENGHADAPI TANTANGAN PENDIDIKAN ERA SOCIETY 5.0," *JURNAL MADINASIKA Manajemen Pendidikan dan Keguruan* 7, no. 1 (24 Juli 2025): 1–10, doi:10.31949/madinasiika.v7i1.14085.

⁴ Muh Nana Supriatna dan Ila Rosmilawati, "Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah: Implikasi bagi Praktik Pendidikan," *Pedagogik Journal of Islamic Elementary School*, 30 April 2025, 194–215, doi:10.24256/pjies.v8i1.6516.

⁵ Marlian Arif Nasution, "Agama dan Masalah Makna Dalam Teori Sosiologis Talcott Parsons," *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam* 4, no. 1 (29 Juni 2022), doi:10.51900/alhikmah.v4i1.12536.

Fenomena dualisme kepemimpinan bukan hanya persoalan konseptual, tetapi juga terjadi secara empiris dalam praktik pendidikan di Indonesia. Salah satu kasus terjadi di SMA Negeri 3 Pulau Morotai, di mana terjadi tumpang tindih otoritas kepemimpinan akibat tidak efektifnya implementasi Surat Keputusan Gubernur. Kondisi tersebut menyebabkan ketidakjelasan struktur kewenangan, serta berdampak pada terganggunya tata kelola administrasi dan proses Pendidikan

Selain terjadi pada level kebijakan formal, dualisme kepemimpinan juga berdampak langsung pada dinamika internal lembaga pendidikan. Dalam konteks pendidikan berbasis pesantren, dualisme kepemimpinan dilaporkan menyebabkan terganggunya pola aktivitas santri, menurunnya semangat organisasi, serta hilangnya arah gerak kolektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik kepemimpinan tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga merusak iklim sosial dan budaya pendidikan.

Namun demikian, realitas empiris dalam lembaga pendidikan Islam, khususnya yang berbasis pesantren, menunjukkan adanya dinamika yang tidak sepenuhnya sejalan dengan asumsi ideal tersebut. Dalam praktiknya, meskipun lembaga telah memiliki struktur formal organisasi seperti kepala sekolah atau pengelola pendidikan, otoritas substantif dalam pengambilan keputusan sering kali tetap terpusat pada kiai sebagai pemimpin kultural. Proses kebijakan tidak hanya berjalan melalui jalur struktural formal, tetapi juga melalui mekanisme kultural yang bermuara pada persetujuan pengasuh atau pimpinan yayasan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur formal organisasi tidak selalu menjadi pusat kekuasaan yang sesungguhnya.

Fenomena tersebut mengindikasikan adanya ketidaksinkronan antara struktur formal dan struktur kekuasaan aktual dalam lembaga pendidikan Islam. Secara administratif, kepala sekolah memiliki kewenangan formal, namun secara kultural, kiai tetap menjadi aktor dominan dalam menentukan arah kebijakan. Dalam perspektif teori otoritas Max Weber, kondisi ini dapat dipahami sebagai dominasi otoritas karismatik yang melekat pada figur kiai, sehingga menggeser peran otoritas rasional-birokratis dalam struktur formal. Akibatnya, pembagian fungsi dalam organisasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, dan berpotensi menimbulkan disfungsi struktural.

Lebih lanjut, kondisi ini juga berdampak pada implementasi kepemimpinan transformasional. Idealnya, kepemimpinan transformasional mendorong perubahan berbasis sistem, visi kolektif, dan partisipasi seluruh elemen organisasi. Namun, ketika kepemimpinan masih bertumpu pada figur sentral, proses transformasi cenderung bergantung pada individu, bukan pada sistem yang terlembagakan. Hal ini menyebabkan proses perubahan menjadi kurang optimal, serta berpotensi menghambat adaptasi lembaga terhadap tuntutan era Society 5.0 yang menuntut inovasi, fleksibilitas, dan responsivitas tinggi.

Secara teoretis, apabila kepemimpinan tidak mampu mengintegrasikan berbagai elemen struktural tersebut, maka akan terjadi disfungsi organisasi, seperti konflik internal, lemahnya

koordinasi, penurunan kinerja guru, hingga kegagalan dalam mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, kepemimpinan transformasional menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap elemen sistem bekerja secara sinergis dan fungsional. Jika ditinjau dalam perspektif strukturalisme-fungsionalisme, kepemimpinan transformasional memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan sistem sosial pendidikan, sekaligus menjadi mekanisme penghubung antara struktur formal dan praktik sosial yang berlangsung.

Oleh karena itu, kajian mengenai kepemimpinan transformasional dalam perspektif strukturalisme-fungsionalisme menjadi penting untuk dilakukan, khususnya dalam memahami fenomena dualisme kepemimpinan dalam pendidikan Islam. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap bagaimana kepemimpinan berperan tidak hanya dalam menjaga stabilitas, tetapi juga dalam menjembatani ketegangan antara struktur formal dan otoritas kultural. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman teoritis yang mendalam mengenai hubungan antara kepemimpinan, struktur organisasi, serta fungsi sosial dalam menciptakan pendidikan Islam yang adaptif, integratif, dan berorientasi pada pembentukan manusia yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing di era modern.

Kepemimpinan transformasional merupakan salah satu model kepemimpinan yang menekankan pada proses perubahan mendasar dalam cara berpikir, nilai, serta motivasi para pengikut. Konsep ini tidak hanya berfokus pada hubungan pertukaran antara pemimpin dan bawahan sebagaimana dalam kepemimpinan transaksional yang menekankan imbalan dan hukuman, tetapi lebih jauh bertujuan menginspirasi individu agar memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap tujuan bersama⁶. Pemimpin transformasional berupaya menggerakkan pengikutnya untuk melampaui kepentingan pribadi demi mencapai visi kolektif organisasi. Dengan demikian, kepemimpinan ini berorientasi pada transformasi nilai, peningkatan kesadaran, serta pengembangan potensi manusia secara maksimal⁷.

Konsep kepemimpinan transformasional banyak dikembangkan oleh para ahli manajemen dan kepemimpinan, khususnya oleh Bernard M. Bass dan Bruce J. Avolio yang mengemukakan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki empat komponen utama yang dikenal sebagai *The Four I's*. Keempat komponen ini menjelaskan bagaimana seorang pemimpin mampu memengaruhi, menginspirasi, dan mengembangkan para pengikutnya secara berkelanjutan⁸.

⁶ Basirun Basirun dan Turimah Turimah, "Konsep Kepemimpinan Transformasional," *Mindset: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11 Maret 2022, 34–41, doi:10.58561/mindset.v1i1.28.

⁷ Aulya Fahma, "KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL UPAYA MENSINERGIKAN KEPEMIMPINAN ISLAM DI INDONESIA: Bahasa Indonesia," *MUMTAZ - Education Management and Islamic Studies* 4, no. 1 (17 Januari 2024): 10–15, doi:10.70936/mumtaz.v4i1.158.

⁸ Moh. Vito Miftahul Munif, "SEJARAH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL," *Dar el-Ilmi : Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora* 11, no. 2 (9 Desember 2024): 145–58, doi:10.52166/darelilmi.v11i2.7911.

Komponen pertama adalah *Idealized Influence* atau pengaruh ideal. Dalam dimensi ini, pemimpin berperan sebagai teladan moral yang dihormati dan dipercaya oleh para pengikutnya. Pemimpin tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga menunjukkan integritas, konsistensi nilai, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip organisasi. Sikap tersebut menciptakan kepercayaan yang kuat antara pemimpin dan anggota organisasi. Pengikut melihat pemimpin sebagai figur yang layak diteladani sehingga mereka terdorong untuk meniru perilaku positif yang ditampilkan. Pengaruh ideal ini juga berkaitan dengan keberanian pemimpin dalam mengambil keputusan yang berlandaskan nilai-nilai etis serta kemampuannya menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi.

Komponen kedua adalah *Inspirational Motivation* atau motivasi inspirasional. Pada dimensi ini, pemimpin memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan visi yang jelas, menarik, dan penuh makna kepada para pengikutnya. Visi tersebut tidak sekadar menjadi slogan organisasi, tetapi diterjemahkan menjadi tujuan bersama yang mampu membangkitkan semangat dan optimisme. Pemimpin transformasional menanamkan rasa percaya diri kepada anggota organisasi bahwa mereka mampu mencapai target yang tinggi. Komunikasi yang dilakukan bersifat persuasif dan membangkitkan semangat kolektif sehingga anggota organisasi merasa memiliki tujuan yang sama dan bersedia bekerja keras untuk mencapainya.

Komponen ketiga adalah *Intellectual Stimulation* atau stimulasi intelektual. Dalam aspek ini, pemimpin mendorong anggota organisasi untuk berpikir secara kreatif dan kritis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Pemimpin tidak memaksakan satu cara tertentu dalam bekerja, melainkan membuka ruang bagi munculnya gagasan-gagasan baru. Setiap anggota didorong untuk berani menyampaikan ide, melakukan inovasi, serta mencari solusi alternatif terhadap tantangan yang dihadapi organisasi. Dengan demikian, kepemimpinan transformasional menciptakan budaya organisasi yang menghargai kreativitas, pembelajaran, serta pengembangan pengetahuan secara berkelanjutan.

Komponen keempat adalah *Individualized Consideration* atau pertimbangan individual. Dimensi ini menekankan perhatian pemimpin terhadap kebutuhan, potensi, dan perkembangan masing-masing anggota organisasi. Pemimpin memahami bahwa setiap individu memiliki karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan kepemimpinan dilakukan secara personal melalui pembinaan, bimbingan, dan pemberian kesempatan untuk berkembang. Pemimpin transformasional tidak hanya memandang anggota

sebagai tenaga kerja, tetapi sebagai individu yang memiliki potensi untuk terus ditingkatkan melalui proses pembelajaran dan pemberdayaan⁹.

Dalam konteks pendidikan, kepemimpinan transformasional memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan. Kepala sekolah yang menerapkan model kepemimpinan transformasional tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan yang mampu mentransformasikan budaya sekolah. Perubahan tersebut mencakup pergeseran dari budaya birokratis yang kaku menuju budaya organisasi yang inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada pengembangan kualitas pendidikan¹⁰.

Kepala sekolah transformasional berupaya membangun visi pendidikan yang jelas dan inspiratif bagi seluruh warga sekolah. Visi tersebut menjadi arah bagi pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran, serta penguatan budaya akademik di lingkungan sekolah¹¹. Melalui komunikasi yang efektif, kepala sekolah mampu menanamkan komitmen bersama kepada guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik untuk mencapai standar pendidikan yang lebih tinggi.

Selain itu, kepemimpinan transformasional juga mendorong guru untuk terus meningkatkan kompetensinya. Kepala sekolah memberikan ruang bagi guru untuk berinovasi dalam metode pembelajaran, mengembangkan strategi pengajaran yang kreatif, serta memanfaatkan teknologi dalam proses pendidikan. Dengan adanya stimulasi intelektual ini, sekolah tidak hanya menjadi tempat transfer pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang pengembangan ide, kreativitas, dan pemikiran kritis¹². Perhatian terhadap kebutuhan individu juga menjadi aspek penting dalam kepemimpinan pendidikan yang transformasional. Kepala sekolah berperan sebagai mentor bagi para guru dan tenaga kependidikan dengan memberikan dukungan profesional maupun emosional. Pendekatan ini menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan motivasi kerja, serta memperkuat rasa memiliki terhadap institusi pendidikan¹³.

⁹ Nani Zahrotul Mufidah dan Mustika Syafi'aturrosyidah, "Dimensi Kepemimpinan Transformatif," *MAANA: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 2, no. 1 (30 April 2023): 14–33, doi:10.52166/mjpiud.v2i1.4742.

¹⁰ M. Luthfi Munir, "TREN TERBARU DALAM KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH UPAYA MEMBANGUN BUDAYA MUTU YANG RESPONSIF TERHADAP PERUBAHAN," *MUDABBIR Journal Research and Education Studies* 5, no. 1 (5 Januari 2025): 38–47, doi:10.56832/mudabbir.v5i1.662.

¹¹ Edo Agustian, Dian Hidayati, dan Widodo Widodo, "Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dalam Penerapan Kurikulum Merdeka," *Journal of Education and Teaching (JET)* 5, no. 3 (5 November 2024): 323–35, doi:10.51454/jet.v5i3.444.

¹² Slamet Riyadi, "Implementasi Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru: Penelitian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (22 Juli 2025): 1983–89, doi:10.31004/jerkin.v4i1.1881.

¹³ Nana Supriatna dan Rosmilawati, "Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah."

Teori strukturalisme–fungsionalisme

Merupakan salah satu pendekatan penting dalam sosiologi yang memandang masyarakat atau organisasi sebagai suatu sistem yang tersusun dari berbagai bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung. Setiap bagian dalam sistem tersebut memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi terhadap kestabilan dan keberlangsungan keseluruhan sistem¹⁴. Jika salah satu bagian tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka keseimbangan sistem dapat terganggu. Dengan demikian, teori ini menekankan pentingnya keteraturan, keterpaduan, dan kerja sama antar unsur dalam suatu struktur sosial.

Gagasan dasar mengenai pendekatan ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Émile Durkheim yang memandang masyarakat sebagai suatu “organisme hidup”. Dalam pandangan ini, masyarakat dianalogikan seperti tubuh manusia yang terdiri dari berbagai organ dengan fungsi masing-masing. Setiap organ memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup tubuh secara keseluruhan¹⁵. Jika salah satu organ tidak berfungsi secara optimal, maka akan berdampak pada kesehatan tubuh secara menyeluruh. Analogi ini kemudian digunakan untuk memahami bagaimana berbagai unsur dalam masyarakat—seperti lembaga pendidikan, keluarga, ekonomi, dan agama—bekerja secara bersama-sama untuk menjaga stabilitas sosial.

Dalam konteks organisasi pendidikan, sekolah dapat dipandang sebagai sebuah sistem sosial yang terdiri dari berbagai komponen seperti kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, serta yayasan penyelenggara pendidikan. Masing-masing komponen tersebut memiliki fungsi tertentu yang saling melengkapi. Guru berfungsi sebagai pelaksana proses pembelajaran, kepala sekolah sebagai pemimpin dan pengarah kebijakan, sementara orang tua berperan dalam mendukung proses pendidikan dari lingkungan keluarga. Ketika salah satu unsur tersebut tidak menjalankan perannya secara optimal, maka keseimbangan sistem sekolah dapat terganggu. Dalam perspektif Durkheim, kondisi gangguan keseimbangan ini dapat disebut sebagai *anomie*, yaitu keadaan ketika norma dan fungsi sosial tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pengembangan lebih lanjut dari pendekatan struktural-fungsional ini dilakukan oleh Talcott Parsons melalui konsep skema AGIL. Parsons menjelaskan bahwa setiap sistem sosial harus mampu menjalankan empat fungsi utama agar dapat bertahan dan berkembang. Keempat fungsi tersebut dikenal dengan singkatan AGIL, yaitu *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency*. Keempat fungsi ini menjadi kerangka analitis untuk memahami bagaimana suatu organisasi mempertahankan stabilitas sekaligus menghadapi perubahan¹⁶.

¹⁴ Kamaruddin, “Fungsionalisme Struktural.”

¹⁵ Fahri Aska, “TEORI FUNGSIONALISME DILIHAT DARI SUDUT PANDANG ANTROPOLOGI HUKUM,” 25 Januari 2022, doi:10.31219/osf.io/makbx.

¹⁶ Anjar Sulistiawati dan Khoirudin Nasution, “Upaya Penanaman Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Telaah Pendekatan Struktural Fungsional Talcott Parsons,” *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar* 4, no. 1 (31 Januari 2022): 24–33, doi:10.36232/jurnalpendidikandasar.v4i1.1839.

Fungsi pertama adalah *Adaptation (A)*, yaitu kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal. Dalam konteks lembaga pendidikan seperti Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), fungsi adaptasi berkaitan dengan kemampuan sekolah menghadapi perubahan zaman, terutama perkembangan teknologi dan kebijakan pendidikan nasional. Pemimpin sekolah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa lembaga pendidikan mampu beradaptasi dengan era digital dan perkembangan konsep *Society 5.0*. Hal ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, peningkatan literasi digital guru, serta penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan masa depan. Selain itu, adaptasi juga mencakup kemampuan sekolah mengikuti regulasi pemerintah serta standar pendidikan yang terus berkembang.

Fungsi kedua adalah *Goal Attainment (G)*, yaitu kemampuan sistem untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam organisasi pendidikan, tujuan menjadi arah yang menggerakkan seluruh aktivitas sekolah. Pada lembaga pendidikan Islam seperti SDIT, tujuan tersebut tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga spiritual dan moral. Salah satu tujuan utama adalah mencetak generasi yang memiliki karakter religius, berakhlak mulia, dan berpengetahuan luas, yang sering dirumuskan dalam konsep generasi Rabbani. Peran pemimpin sekolah dalam fungsi ini adalah memastikan bahwa seluruh elemen organisasi—mulai dari guru, tenaga kependidikan, hingga peserta didik—bergerak secara sinergis untuk mencapai tujuan tersebut melalui program pendidikan, kegiatan pembinaan karakter, serta sistem evaluasi yang terarah.

Fungsi ketiga adalah *Integration (I)*, yaitu kemampuan sistem untuk menjaga koordinasi dan hubungan yang harmonis antar bagian dalam organisasi. Integrasi menjadi sangat penting dalam lembaga pendidikan karena sekolah melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Kepala sekolah harus mampu mengoordinasikan hubungan antara yayasan sebagai penyelenggara, guru sebagai pelaksana pendidikan, serta orang tua sebagai mitra dalam proses pembelajaran. Jika koordinasi ini tidak berjalan dengan baik, potensi konflik dapat muncul dan mengganggu stabilitas organisasi sekolah. Oleh karena itu, pemimpin perlu membangun komunikasi yang terbuka, menciptakan mekanisme kerja sama yang jelas, serta mengembangkan budaya organisasi yang menekankan nilai kebersamaan dan tanggung jawab kolektif.

Fungsi keempat adalah *Latency (L)* atau pemeliharaan pola (*pattern maintenance*), yaitu kemampuan sistem untuk menjaga nilai-nilai, norma, dan budaya yang menjadi dasar keberlangsungan organisasi. Dalam lembaga pendidikan Islam, fungsi ini berkaitan erat dengan pemeliharaan nilai-nilai keislaman yang menjadi identitas sekolah. Pemimpin sekolah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar diinternalisasi dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan melalui pembiasaan ibadah, penguatan pendidikan karakter Islami, serta penciptaan budaya sekolah yang

mencerminkan etika dan moralitas Islam. Dengan demikian, nilai-nilai tersebut tetap terjaga dan menjadi fondasi bagi perkembangan generasi peserta didik¹⁷.

Melalui kerangka struktural-fungsionalisme dan skema AGIL, organisasi pendidikan dapat dipahami sebagai sistem sosial yang dinamis tetapi tetap membutuhkan keseimbangan. Keberhasilan sebuah sekolah tidak hanya ditentukan oleh satu unsur saja, melainkan oleh keterpaduan seluruh komponen yang menjalankan fungsinya secara optimal. Kepemimpinan yang efektif menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan nilai dapat berjalan secara harmonis dalam sistem pendidikan.

Pendidikan Islam sebagai Sistem Sosial

Pendidikan Islam dapat dipahami sebagai suatu sistem sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan nilai, norma, dan struktur perilaku dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membangun tatanan sosial yang berlandaskan pada prinsip tauhid, sehingga seluruh aktivitas pendidikan diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara dimensi spiritual, intelektual, dan sosial¹⁸. Pendidikan tidak berdiri secara terpisah dari realitas masyarakat, melainkan menjadi bagian integral yang memengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, dan peradaban.

Salah satu karakter utama pendidikan Islam adalah integrasi antara ilmu dan nilai-nilai keislaman. Dalam tradisi epistemologi Islam, tidak dikenal dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, karena seluruh ilmu pada hakikatnya bersumber dari Allah dan memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia¹⁹. Gagasan ini sejalan dengan pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas yang menekankan bahwa ilmu harus berlandaskan pada pandangan hidup Islam agar tidak kehilangan arah dan tujuan moralnya. Senada dengan itu, Ismail Raji al-Faruqi mengemukakan pentingnya Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai upaya mengintegrasikan perkembangan ilmu modern dengan nilai-nilai tauhid. Dalam kerangka ini, ilmu tidak hanya dipandang sebagai alat untuk memahami realitas, tetapi juga sebagai sarana ibadah dan pengabdian kepada Allah.

Integrasi ilmu dan nilai Islam dalam praktik pendidikan tercermin dalam kurikulum dan proses pembelajaran yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga afektif dan spiritual.

¹⁷ Fauzan Isma, "Transformasi Kepemimpinan Pendidikan Islam dalam Era Digital: Tantangan dan Peluang bagi Kepala Sekolah," *Jurnal Generasi Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (24 April 2025): 70–79, doi:10.59342/jgt.v4i1.731.

¹⁸ Mark Halstead, "An Islamic Concept of Education," *Comparative Education* 40, no. 4 (November 2004): 517–29, doi:10.1080/0305006042000284510.

¹⁹ Nadeem A. Memon, Mohamad Abdalla, dan Dylan Chown, "Laying Foundations for Islamic Teacher Education," *Education Sciences* 14, no. 10 (25 September 2024): 1046, doi:10.3390/educsci14101046.

Setiap disiplin ilmu diarahkan untuk membentuk kesadaran ketuhanan, tanggung jawab moral, serta orientasi pada kemaslahatan sosial. Dengan demikian, pendidikan Islam berupaya melahirkan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan kepedulian sosial yang tinggi²⁰.

Dalam konteks sistem sosial, pendidikan Islam menjalankan berbagai fungsi penting yang menopang keberlangsungan masyarakat. Pendidikan berperan sebagai sarana sosialisasi nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan, amanah, dan ukhuwah, yang menjadi fondasi dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Melalui proses pendidikan, nilai-nilai tersebut ditanamkan secara sistematis sehingga membentuk karakter individu dan pola interaksi sosial yang beradab. Selain itu, pendidikan Islam juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial. Nilai dan norma yang diajarkan dalam pendidikan membentuk kesadaran internal individu untuk berperilaku sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tercipta keteraturan sosial tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kontrol eksternal. Dalam hal ini, pendidikan menjadi instrumen efektif dalam mencegah penyimpangan sosial dan menjaga stabilitas masyarakat. Lebih jauh, pendidikan Islam memiliki peran sebagai agen transformasi sosial. Sejarah menunjukkan bahwa pendidikan yang dibangun oleh Nabi Muhammad mampu mengubah masyarakat dari kondisi jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya bersifat konservatif dalam mempertahankan nilai, tetapi juga progresif dalam mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik²¹.

Di sisi lain, pendidikan Islam juga berfungsi sebagai sarana integrasi sosial yang menyatukan berbagai kelompok dalam masyarakat melalui nilai persaudaraan dan keadilan. Dalam masyarakat yang plural, pendidikan Islam berkontribusi dalam menciptakan kohesi sosial dengan menanamkan sikap toleransi dan saling menghargai. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam mereproduksi budaya dan peradaban Islam, memastikan bahwa nilai, tradisi keilmuan, dan etika sosial tetap terjaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya²².

Dengan demikian, pendidikan Islam sebagai sistem sosial memiliki karakter yang holistik dan integratif. Ia tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan formal, tetapi juga sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat yang berkeadilan, beradab, dan berorientasi pada kemaslahatan. Integrasi antara ilmu dan nilai Islam menjadi fondasi utama dalam menciptakan

²⁰ Irpan Irpan dan Zohaib Hassan Sain, "The Crucial Role of Islamic Religious Education in Shaping Children's Character: Psychological and Spiritual Review," *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 16, no. 1 (28 Mei 2024): 383–92, doi:10.37680/qalamuna.v16i1.4902.

²¹ Jenuri dkk., "Overcoming the Spiritual Emptiness of Students in the Modern Era through the Integration of Al-Ghazali's Human Concepts in the Islamic Religious Education Learning Model," *Cogent Education* 12, no. 1 (31 Desember 2025): 2497147, doi:10.1080/2331186X.2025.2497147.

²² Marzuki Marzuki, Miftahuddin Miftahuddin, dan Mukhamad Murdiono, "Multicultural Education In Salaf Pesantren And Prevention Of Religious Radicalism In Indonesia," *Jurnal Cakrawala Pendidikan* 39, no. 1 (2 Februari 2020): 12–25, doi:10.21831/cp.v39i1.22900.

manusia yang mampu menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat.

Berdasarkan uraian teoritis di atas, dapat ditarik benang merah bahwa kepemimpinan transformasional, teori strukturalisme-fungsionalisme, dan konsep PAI sebagai sistem sosial terintegrasi memiliki keterkaitan yang saling menguatkan. Kepemimpinan transformasional berfungsi sebagai motor penggerak perubahan yang mengarahkan individu dan kelompok menuju visi bersama melalui proses inspirasi, pemberdayaan, dan internalisasi nilai. Sementara itu, dalam perspektif Talcott Parsons, keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuannya menjalankan fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola secara seimbang. Dalam konteks ini, kepemimpinan transformasional menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa setiap komponen dalam sistem pendidikan menjalankan fungsinya secara optimal. Di sisi lain, konsep PAI sebagai sistem pendidikan berbasis integrasi nilai Islam memberikan konteks normatif yang memperkuat fungsi latency (pemeliharaan nilai) sebagaimana juga sejalan dengan pandangan Emile Durkheim tentang pentingnya konsensus nilai dalam menjaga keteraturan sosial. Dengan demikian, ketiga kerangka teori ini membentuk suatu konstruksi analitis yang utuh dalam memahami dinamika organisasi pendidikan Islam.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian kritis dan mendalam terhadap berbagai literatur, dokumen, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah, teori kepemimpinan transformasional, dan strukturalisme-fungsionalisme. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan memanfaatkan data sekunder untuk membangun argumentasi teoretis mengenai keseimbangan antara stabilitas dan perubahan dalam sistem pendidikan Islam.

Data penelitian bersumber dari data sekunder yang terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi buku-buku karya tokoh utama teori kepemimpinan transformasional, seperti Bernard M. Bass, serta teori strukturalisme-fungsionalisme dari Talcott Parsons, khususnya konsep AGIL. Adapun sumber sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah bereputasi, prosiding konferensi, tesis, disertasi, dan dokumen kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan digitalisasi sekolah dan pengembangan kurikulum modern. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan penelusuran literatur secara sistematis menggunakan basis data digital seperti Google Scholar dan ResearchGate.

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama (human instrument) yang bertugas merencanakan penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data,

hingga menyusun laporan hasil penelitian. Analisis penelitian mengacu pada indikator kepemimpinan transformasional yang meliputi *idealized influence*, *inspirational motivation*, *intellectual stimulation*, dan *individualized consideration*. Selain itu, penelitian juga menggunakan indikator strukturalisme-fungsionalisme berupa adaptasi teknologi, pencapaian visi Rabbani, integrasi antar elemen lembaga, serta pemeliharaan nilai-nilai Islami.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis kritis. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data dengan memilah literatur yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian data dalam bentuk sintesis teori transformasional dan konsep AGIL secara naratif, serta penarikan kesimpulan untuk merumuskan proposisi mengenai kemampuan kepala sekolah dalam menjaga harmoni antara inovasi pendidikan dan stabilitas nilai-nilai fundamental lembaga pendidikan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dualisme Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam tidak sepenuhnya terpusat pada kepala sekolah sebagai pemimpin formal, melainkan berlangsung dalam konfigurasi yang lebih kompleks melalui keterlibatan otoritas kultural kiai sebagai pengasuh pesantren. Dalam konteks ini, kepemimpinan transformasional tidak sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam struktur formal organisasi, tetapi berjalan secara parsial dan terdistribusi. Kepala sekolah menjalankan fungsi administratif dan operasional, sedangkan kiai memiliki pengaruh dominan dalam menentukan arah nilai, budaya, dan legitimasi sosial lembaga pendidikan.

Fenomena tersebut sejalan dengan kondisi dualisme kepemimpinan yang terjadi di SMA Negeri 3 Pulau Morotai akibat tidak efektifnya implementasi Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Utara mengenai penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) kepala sekolah. Meskipun secara administratif telah ditetapkan pejabat baru, pejabat lama masih menjalankan fungsi kepemimpinan sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan. Situasi ini menyebabkan ketidakjelasan struktur organisasi, terganggunya tata kelola administrasi sekolah, serta munculnya keresahan di kalangan guru dan orang tua siswa. Ketidakpastian kepemimpinan juga menimbulkan kekhawatiran terkait keabsahan dokumen akademik dan pengelolaan dana pendidikan yang berpotensi menghambat layanan pendidikan secara keseluruhan.

Dalam perspektif teori otoritas Max Weber, kepala sekolah merepresentasikan otoritas rasional-birokratis, sedangkan kiai mencerminkan otoritas karismatik yang memiliki legitimasi sosial dan simbolik lebih kuat dalam lingkungan pesantren. Dominasi otoritas karismatik menyebabkan proses transformasi pendidikan tidak sepenuhnya berbasis sistem organisasi formal, tetapi sangat dipengaruhi oleh figur sentral yang memiliki pengaruh kultural. Akibatnya,

implementasi kepemimpinan transformasional menjadi tidak sepenuhnya kolektif dan sistemik karena dipengaruhi oleh relasi antara struktur formal dan kekuasaan sosial-kultural yang berkembang dalam lembaga pendidikan Islam.

Implementasi Kepemimpinan Transformasional dalam Sistem Pendidikan Islam

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah tetap menjalankan fungsi kepemimpinan transformasional pada level operasional melalui pemberian motivasi inspirasional kepada guru, dorongan terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran, serta pendampingan individual guna meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. Kepala sekolah juga berupaya mendorong inovasi pedagogik melalui stimulasi intelektual sebagai respons terhadap tuntutan digitalisasi pendidikan dan perubahan sistem pembelajaran di era modern.

Namun demikian, dimensi *idealized influence* sebagai elemen utama kepemimpinan transformasional tidak sepenuhnya berada pada kepala sekolah. Pengaruh ideal justru lebih melekat pada figur kiai yang memiliki legitimasi normatif dan simbolik dalam kehidupan pesantren. Kiai menjadi pusat rujukan moral dan spiritual sehingga kebijakan strategis serta orientasi nilai lembaga lebih banyak berada dalam pengaruh otoritas tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional dalam pendidikan Islam tidak berjalan secara utuh dalam satu struktur formal, tetapi dipengaruhi oleh interaksi antara pemimpin administratif dan pemimpin kultural.

Dalam kerangka strukturalisme-fungsionalisme Talcott Parsons, kepala sekolah lebih dominan menjalankan fungsi *adaptation* dan *goal attainment* melalui inovasi pembelajaran, digitalisasi pendidikan, dan pencapaian target akademik. Sebaliknya, kiai menjalankan fungsi *integration* dan *latency* dengan menjaga stabilitas nilai, norma, tradisi, dan identitas keislaman lembaga. Pembagian fungsi tersebut memperlihatkan bahwa sistem pendidikan Islam berjalan dalam pola distribusi peran yang bersifat kontekstual dan kultural. Walaupun sistem tetap dapat berjalan secara fungsional, pemisahan peran ini berpotensi menimbulkan disfungsi apabila koordinasi antara kepala sekolah dan kiai tidak berlangsung secara harmonis.

Relasi Dialektis antara Transformasi dan Stabilitas dalam Pendidikan Islam

Pembahasan penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara kepemimpinan transformasional dan strukturalisme-fungsionalisme dalam pendidikan Islam bersifat dialektis, bukan harmonis secara otomatis. Transformasi pendidikan membutuhkan inovasi, keterbukaan terhadap perubahan, dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi serta tuntutan globalisasi. Di sisi lain, lembaga pendidikan Islam juga memiliki kebutuhan untuk menjaga

stabilitas nilai, identitas religius, dan kohesi sosial agar tidak kehilangan karakter dasarnya sebagai institusi berbasis nilai-nilai keislaman.

Keberadaan kiai sebagai pemimpin kultural memberikan kontribusi penting dalam menjaga fungsi latency dan integration sehingga stabilitas sosial dan moral lembaga tetap terpelihara. Akan tetapi, dominasi otoritas kultural juga dapat membatasi ruang gerak kepala sekolah dalam mengambil keputusan strategis dan melakukan inovasi pendidikan secara lebih progresif. Kondisi ini menyebabkan fungsi adaptation yang dijalankan kepala sekolah tidak selalu berjalan optimal dalam menghadapi perubahan zaman dan perkembangan sistem pendidikan modern.

Oleh karena itu, keberhasilan kepemimpinan transformasional dalam pendidikan Islam tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individual kepala sekolah, tetapi juga oleh kemampuan membangun harmonisasi antara struktur formal dan otoritas kultural. Transformasi akan berjalan efektif apabila seluruh fungsi AGIL dapat terintegrasi dalam satu sistem yang saling mendukung. Tanpa integrasi tersebut, lembaga pendidikan berpotensi mengalami stagnasi akibat dominasi tradisi, atau bahkan disintegrasi akibat lemahnya koordinasi antara aktor formal dan kultural. Dengan demikian, kepemimpinan transformasional dalam pendidikan Islam harus dipahami sebagai proses kolektif yang menempatkan inovasi dan stabilitas nilai sebagai dua elemen yang saling melengkapi dalam mewujudkan perubahan pendidikan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

kepemimpinan kepala sekolah memegang peranan vital sebagai mesin penggerak sekaligus penjaga keseimbangan dalam sistem pendidikan Islam di era disrupsi. Melalui lensa kepemimpinan transformasional, kepala sekolah berperan sebagai agen perubahan yang menginspirasi inovasi, digitalisasi, dan implementasi kurikulum modern melalui empat pilar utama: pengaruh ideal, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual. Ditinjau dari perspektif strukturalisme-fungsionalisme, keberhasilan transformasi tersebut bergantung pada kemampuan kepala sekolah dalam menjalankan skema AGIL secara harmonis.

Kepemimpinan transformasional memberikan daya dorong bagi fungsi Adaptasi (*Adaptation*) dan Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*) untuk merespons dinamika zaman. Namun, stabilitas sistem tetap terjaga melalui fungsi Integrasi (*Integration*) dan Latensi (*Latency*), di mana nilai-nilai Islami tetap dipertahankan sebagai identitas lembaga dan filter terhadap arus perubahan eksternal. Dengan demikian, harmoni sistem pendidikan tercapai ketika inovasi tidak menceraiberaht sekolah dari akar moralnya, melainkan memperkuat nilai-nilai Islami sebagai fondasi organisasi yang adaptif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, E., Hidayati, D., & Widodo, W. (2024). Kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam penerapan Kurikulum Merdeka. *Journal of Education and Teaching (JET)*, 5(3), 323–335.
- Antonopoulou, H., Halkiopoulos, C., Barlou, O., & Beligiannis, G. N. (2021). Transformational leadership and digital skills in higher education institutes: During the COVID-19 pandemic. *Emerging Science Journal*, 5(1), 1–15.
- Aska, F. (2022). *Teori fungsionalisme dilihat dari sudut pandang antropologi hukum*.
- Basirun, B., & Turimah, T. (2022). Konsep kepemimpinan transformasional. *Mindset: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 34–41.
- Cahaya, C., Rusdi, M., & Damanik, M. Z. (2024). Analysis of leadership crisis factors in Islamic educational institutions (Case study at MAS Al-Washliyah Tanjung Tiram). *Didaktika Religia*, 12(1), 141–156.
- Emilya Zeynalova Faig. (2024). Strategies for transformative leadership in educational settings: Realizing effective implementation goals. *International Journal of Innovative Technologies in Social Science*, (1(41)).
- Fahma, A. (2024). Kepemimpinan transformasional upaya mensinergikan kepemimpinan Islam di Indonesia. *MUMTAZ - Education Management and Islamic Studies*, 4(1), 10–15.
- Halstead, M. (2004). An Islamic concept of education. *Comparative Education*, 40(4), 517–529.
- Irpan, I., & Sain, Z. H. (2024). The crucial role of Islamic religious education in shaping children's character: Psychological and spiritual review. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 16(1), 383–392.
- Isma, F. (2025). Transformasi kepemimpinan pendidikan Islam dalam era digital: Tantangan dan peluang bagi kepala sekolah. *Jurnal Generasi Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 70–79.
- Jenuri, A. F., Suresman, E., Abdullah, M., & Fahrudin. (2025). Overcoming the spiritual emptiness of students in the modern era through the integration of Al-Ghazali's human concepts in the Islamic religious education learning model. *Cogent Education*, 12(1), 2497147.
- Kamaruddin, S. A. (2025). Fungsionalisme struktural: Fondasi, perkembangan, dan relevansi dalam analisis sosial kontemporer serta implikasinya dalam pendidikan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(4b), 62–70.
- Marzuki, M., Miftahuddin, M., & Murdiono, M. (2020). Multicultural education in salaf pesantren and prevention of religious radicalism in Indonesia. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 39(1), 12–25.
- Memon, N. A., Abdalla, M., & Chown, D. (2024). Laying foundations for Islamic teacher education. *Education Sciences*, 14(10), 1046.
- Mufidah, N. Z., & Syafi'aturrosyidah, M. (2023). Dimensi kepemimpinan transformatif. *MAANA: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2(1), 14–33.
- Munif, M. V. M. (2024). Sejarah kepemimpinan transformasional. *Dar el-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora*, 11(2), 145–158.
- Munir, M. L. (2025). Tren terbaru dalam kepemimpinan kepala sekolah upaya membangun budaya mutu yang responsif terhadap perubahan. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 5(1), 38–47.

- Murtiningsih, R. S., Ariani, I., Nugroho, H. W., & Utomo, A. H. (2023). Strengthening character through digital pedagogy in facing the era of Society 5.0. *Digital Press Social Sciences and Humanities*, 9, 00017.
- Nasution, M. A. (2022). Agama dan masalah makna dalam teori sosiologis Talcott Parsons. *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam*, 4(1).
- Rifai Siregar, A., Mahmud Siregar, J., & Setiawan, D. (2026). *Exploration of the principal's transformational leadership style in increasing teacher motivation*. Semantic Scholar.
- Riyadi, S. (2025). Implementasi kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 1983–1989.
- Siregar, Y. D., Nasution, H. B., & Arsyad, J. (2023). Unveiling the impact of Naqshbandiyya Tariqa values on Islamic education: A comprehensive analysis of Pesantren Dar Al Ma'arif Kota Pinang. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(3), 2746–2755.
- Sulistiawati, A., & Nasution, K. (2022). Upaya penanaman pendidikan karakter di sekolah dasar telaah pendekatan struktural fungsional Talcott Parsons. *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar*, 4(1), 24–33.
- Supriatna, N., & Rosmilawati, I. (2025). Kepemimpinan transformasional kepala sekolah: Implikasi bagi praktik pendidikan. *Pedagogik Journal of Islamic Elementary School*, 194–215.
- Yunita, E., Isjtidla, J., & Victorynie, I. (2025). Peran kepemimpinan visioner kepala sekolah dalam menghadapi tantangan pendidikan era Society 5.0. *Jurnal Madinasika Manajemen Pendidikan dan Keguruan*, 7(1), 1–10.